

## PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK: PERAN MODERASI KARAKTERISTIK DEMOGRAFIS

Sadiman<sup>1</sup>, Sabitah<sup>2</sup>, Rila Maufira<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Gunung Leuser

---

### Article Info

#### Article history:

Received: 22 Nov 2025

Revised: 24 Nov 2025

Accepted: 29 Nov 2025

#### Keywords:

Village Apparatus  
Competence, Public Service,  
Education, Training,  
Moderation

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of village apparatus competence on the quality of public services in Khutung Mbelang Village, Tanoh Alas Sub-district, Southeast Aceh Regency. Competence is measured through four main dimensions: regulatory knowledge, technical skills, service attitude, and information technology utilization. The study also investigates whether demographic characteristics such as education, age, position, and training experience moderate the relationship between competence and public service quality. A quantitative approach was used, employing a survey method involving 12 active village officials selected through total sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed using multiple linear regression and interaction moderation tests. The results show that all four dimensions of competence have a positive and significant influence on public service quality, both partially and simultaneously. Service attitude and regulatory knowledge emerged as the most dominant factors. The coefficient of determination ( $R^2$ ) value of 0.741 indicates that 74.1% of the variation in public service quality can be explained by the competence of the village apparatus. Moderation analysis reveals that education and training significantly moderate the relationship between competence and service quality, while age and position do not. These findings support the Competency-Based Management and New Public Service theories, and emphasize the importance of ongoing training and capacity development. The study recommends implementing competence development strategies based on actual village needs to promote professional, efficient, and participatory public service delivery.*

*This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.*



---

#### Corresponding Author:

Name: Sadiman

Email: [sadimandiman861@gmail.com](mailto:sadimandiman861@gmail.com)

---

DOI:

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa, sebagai ujung tombak birokrasi terdepan, memegang peran krusial dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Pengaturan mengenai desa, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik, telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 4 ayat 6 UU tersebut menyatakan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik sebagai dasar percepatan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kapasitas dan kompetensi aparatur desa yang bertugas langsung melayani masyarakat (Rizal, 2022). Aparatur desa yang kompeten, yang memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, sikap profesional, dan kemampuan adaptasi teknologi, diyakini mampu memberikan layanan yang efisien, responsif, dan transparan. Sebaliknya, ketidakmampuan aparatur dapat menjadi sumber inefisiensi birokrasi dan menurunnya kepuasan masyarakat (Hayati, 2023).

Secara empiris, berbagai studi mengindikasikan adanya disparitas kualitas aparatur desa di Indonesia. Laporan Statistik Potensi Desa dan pelaksanaan SDGs Desa oleh Kementerian Desa (2023) menunjukkan bahwa banyak desa masih menghadapi tantangan serius dalam hal kapasitas teknis administratif dan pemanfaatan teknologi informasi. Di Kabupaten Aceh Tenggara sendiri, studi lokal seperti yang dilakukan oleh Purwana & Sinurat (2024) di desa tetangga mengungkap kelemahan dalam layanan publik, seperti proses administratif yang tidak efisien dan keterbatasan sumber daya manusia aparatur. Desa Khutung Mbelang, sebagai salah satu desa di Kecamatan Tanoh Alas, diduga juga menghadapi permasalahan serupa, namun hingga kini belum banyak dikaji secara empiris dan sistematis. Hal ini menciptakan kesenjangan (gap) penelitian yang penting untuk diisi, khususnya dalam konteks Aceh Tenggara.

Berdasarkan observasi terhadap studi-studi terdahulu, terdapat beberapa permasalahan umum yang kerap dihadapi, seperti variasi kompetensi teknis aparatur (Rahman, 2023), keterbatasan akses terhadap pelatihan rutin (Indrawati, 2020), sikap pelayanan yang belum konsisten (Rizal, 2022), serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi (Kementerian Desa, 2023). Berangkat dari identifikasi masalah ini, penelitian terdahulu telah banyak membuktikan hubungan positif antara kompetensi aparatur dan kualitas pelayanan. Namun, penelitian-penelitian tersebut seringkali hanya melihat hubungan langsung tanpa mempertimbangkan faktor kontinjenji yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut, seperti karakteristik individu aparatur itu sendiri.

Beberapa penelitian seperti Heldawati (2021) dan Profita (2020) telah memasukkan variabel seperti teknologi informasi dan kontrol internal, namun belum banyak yang secara spesifik menguji peran karakteristik demografis (pendidikan, usia, jabatan, pelatihan) sebagai variabel pemoderasi. Studi dari Gorontalo (2023) bahkan menemukan bahwa kompetensi tidak signifikan terhadap kinerja, yang mengisyaratkan adanya variabel lain yang mempengaruhi. Kesenjangan inilah yang hendak ditutup oleh artikel ini. Dengan menguji peran moderasi faktor demografis, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi hubungan langsung antara kompetensi dan pelayanan, tetapi juga memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang *bagaimana* dan *dalam kondisi seperti* hubungan tersebut menjadi lebih kuat.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, secara ilmiah, artikel ini berkontribusi memperkaya literatur administrasi publik dengan menyajikan bukti empiris dari sebuah desa yang belum pernah diteliti, sekaligus mengintegrasikan perspektif moderasi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Kedua, secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dalam merumuskan kebijakan dan program pengembangan kompetensi aparatur desa yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis pada kebutuhan serta profil demografis aparatur di lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan utama artikel ini adalah untuk menganalisis pengaruh langsung kompetensi aparatur desa terhadap kualitas pelayanan publik dan menguji apakah karakteristik demografis memoderasi hubungan tersebut di Desa Khutung Mbelang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan verifikatif. Desain ini dipilih untuk mendeskripsikan kondisi variabel penelitian dan menguji pengaruh serta peran moderasi yang telah dirumuskan dalam hipotesis (Sugiyono, 2016). Penelitian dilaksanakan di Desa Khutung Mbelang, Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, selama bulan Juni hingga Agustus 2025.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa aktif yang terdaftar dalam struktur Pemerintahan Desa Khutung Mbelang, yang berjumlah 12 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil dan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, di mana seluruh anggota populasi dijadikan responden. Karakteristik responden meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi, Kepala Dusun, dan Staf Administrasi.

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama, yang disusun dengan skala Likert 1-5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju). Kuesioner dirancang untuk mengukur empat dimensi kompetensi (X) dan lima indikator kualitas pelayanan publik (Y), serta data demografis responden (Z). Sebelum digunakan, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji validitas terhadap semua item pernyataan menunjukkan nilai  $r$ -hitung  $>$   $r$ -tabel (0,381), sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha juga menghasilkan nilai 0,821 untuk variabel kompetensi dan 0,856 untuk variabel pelayanan publik, yang melebihi batas minimal 0,60, sehingga instrumen dinyatakan reliabel.

Selain data primer dari kuesioner, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari dokumen profil desa dan struktur organisasi untuk mendukung analisis. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis regresi linear berganda dan analisis moderasi menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data telah memenuhi semua asumsi klasik, sehingga model regresi layak digunakan untuk prediksi dan pengujian hipotesis.

DOI:

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang merupakan aparatur desa aktif di Pemerintahan Desa Khutung Mbelang, Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Responden dipilih melalui teknik total sampling, karena jumlah populasi relatif kecil dan semua memenuhi kriteria sebagai perangkat desa aktif. Berikut adalah rincian jabatan dan jumlah responden berdasarkan struktur organisasi desa:

Tabel 1 Jumlah Responden

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Kepala Urusan (Kaur)	2 orang
4	Kepala Seksi (Kasi)	2 orang
5	Kepala Dusun	4 orang
6	Staf Administrasi Umum	2 orang
Total		12 orang

Sumber: data diolah oleh penulis, 2025

### 1. Tingkat Pendidikan

Distribusi tingkat pendidikan terakhir responden adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	SMA/sederajat	6 orang	50,0%
2	Diploma (D3)	4 orang	33,3%
3	Sarjana (S1)	2 orang	16,7%
Total		12 orang	100%

Sumber: data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, Mayoritas aparatur desa lulusan SMA dan D3, menunjukkan bahwa sebagian besar belum memiliki pendidikan tinggi formal, namun cukup memadai untuk tugas administratif desa.

### 2. Rentang Usia

Berdasarkan usia, responden dikategorikan ke dalam 3 kelompok:

Tabel 3. Distribusi Usia Responden

No	Rentang Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	25–34 tahun	3 orang	25,0%
2	35–44 tahun	5 orang	41,7%
3	45–55 tahun	4 orang	33,3%

Total	12 orang	100%
-------	----------	------

Sumber: data diolah oleh penulis, 2025

Dengan demikian, pada tabel diatas bahwa, mayoritas responden berada pada usia produktif dan matang secara pengalaman kerja. Dan usia didominasi oleh 35–44 tahun yaitu sebanyak 5 orang dengan tingkat persentase sebesar 41,7%

### 3. Jenis Jabatan

Responden juga diklasifikasikan menurut jenis jabatannya:

**Tabel 4. Distribusi Jenis Jabatan Responden**

No	Jenis Jabatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Jabatan Struktural	8 orang	66,7%
2	Jabatan Fungsional	4 orang	33,3%
Total		12 orang	100%

Sumber: data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 4, mayoritas responden yaitu sebanyak 8 orang (66,7%) menduduki jabatan struktural, yang mencakup posisi seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Seksi (Kasi). Jabatan struktural ini umumnya memiliki peran utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan berbagai program dan pelayanan desa. Sementara itu, 4 orang responden (33,3%) lainnya merupakan aparatur dengan jabatan fungsional, seperti Kepala Dusun dan staf administrasi, yang lebih banyak bertugas secara teknis-operasional dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan kegiatan lapangan.

Dominasi jabatan struktural menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kewenangan penting dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pelayanan publik. Hal ini relevan untuk menilai bagaimana kompetensi mereka secara langsung memengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat.

### Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:  $Y = 1,832 + 0,413X_1 + 0,285X_2 + 0,372X_3 + 0,248X_4$ . Persamaan ini menunjukkan bahwa semua dimensi kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,741 mengindikasikan bahwa 74,1% variasi kualitas pelayanan publik dapat dijelaskan oleh keempat dimensi kompetensi secara bersama-sama.

Pengujian secara parsial (Uji t) membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan ( $p\text{-value} < 0,05$ ). Sikap pelayanan ( $X_3$ ) dan pengetahuan regulasi ( $X_1$ ) memiliki koefisien regresi dan nilai t-hitung tertinggi, menjadikannya dimensi yang paling dominan. Pengujian secara simultan (Uji F) juga menghasilkan F-hitung ( $14,623 > F\text{-tabel}$  (2,74)) dengan signifikansi 0,000, yang berarti kompetensi aparatur secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.

### Analisis Moderator

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah karakteristik demografis aparatur desa seperti pendidikan, usia, jabatan, dan pengalaman pelatihan—memoderasi hubungan antara kompetensi aparatur dengan kualitas pelayanan publik.

Uji dilakukan menggunakan model Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis/MRA*) dengan pendekatan interaksi antara variabel kompetensi dan variabel moderator.

**Tabel 6 Hasil Uji Moderasi (Interaksi Variabel Demografis)**

No	Variabel Moderator	Koefisien Interaksi	Sig. (p-value)	Keterangan
1	Pendidikan	0,482	0,014	Signifikan → Memoderasi hubungan
2	Pengalaman Pelatihan	0,395	0,027	Signifikan → Memoderasi hubungan
3	Usia	0,176	0,241	Tidak signifikan
4	Jabatan	0,123	0,318	Tidak signifikan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2025

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan dan pengalaman pelatihan berperan sebagai moderator signifikan yang memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur dan kualitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur dengan pendidikan lebih tinggi dan pengalaman pelatihan yang lebih banyak cenderung mampu mengaplikasikan kompetensinya secara lebih optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
2. Sebaliknya, usia dan jabatan tidak berpengaruh signifikan sebagai moderator. Artinya, meskipun usia dan posisi dalam struktur pemerintahan mungkin memengaruhi pengalaman kerja, faktor tersebut tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara kompetensi dan pelayanan publik secara statistik.

Dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan pelayanan publik melalui penguatan kompetensi aparatur akan lebih efektif jika disertai dengan intervensi pendidikan formal dan pelatihan teknis yang berkelanjutan. Sebaliknya, promosi jabatan atau faktor usia saja tidak cukup untuk meningkatkan dampak kompetensi terhadap pelayanan publik apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan.

### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Khutung Mbelang. Empat dimensi kompetensi yang diteliti yakni pengetahuan regulasi, keterampilan teknis, sikap pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi seluruhnya menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan yang diterima.

Secara khusus, dua dimensi yaitu sikap pelayanan dan pengetahuan regulasi memiliki pengaruh paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap profesional, keramahan, tanggung

DOI:

jawab, serta pemahaman terhadap aturan dan prosedur administratif menjadi elemen kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif dan memuaskan.

Temuan ini konsisten dengan teori Competency-Based Management yang dikemukakan oleh Horton, Hondeghem, dan Farnham (2011), yang menyatakan bahwa keberhasilan organisasi sektor publik sangat bergantung pada pengelolaan kompetensi sumber daya manusianya. Dalam konteks desa, ketika aparatur memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi, mampu menerapkan keterampilan teknis, dan menunjukkan etika pelayanan publik yang baik, maka pelayanan akan lebih profesional dan tepat sasaran.

Temuan ini juga sejalan dengan teori New Public Service (NPS) yang dikembangkan oleh Denhardt & Denhardt (2013), yang menekankan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada kepentingan warga negara, bukan sekadar efisiensi birokrasi. Dalam paradigma ini, kompetensi aparatur tidak hanya dinilai dari teknis administratif, tetapi juga dari kemampuannya membangun hubungan sosial, partisipatif, dan akuntabel dalam melayani masyarakat.

Lebih lanjut, hasil analisis moderator memperlihatkan bahwa pendidikan dan pengalaman pelatihan berperan penting dalam memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur dan kualitas pelayanan. Aparatur desa yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi dan aktif mengikuti pelatihan, cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengimplementasikan pengetahuan dan sikap pelayanan dalam praktik kerja sehari-hari. Temuan ini memperkuat hasil penelitian oleh Agustina & Pratama (2021), yang menyebutkan bahwa kompetensi aparatur dan pelatihan teknis merupakan faktor krusial dalam peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pelayanan desa.

Di sisi lain, usia dan jabatan tidak berpengaruh signifikan sebagai moderator. Ini menunjukkan bahwa senioritas atau posisi struktural tidak selalu menjamin kapabilitas pelayanan yang lebih baik, terutama jika tidak diiringi dengan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Hasil ini konsisten dengan studi Profita (2020) dan Rinaldi (2019), yang menemukan bahwa kompetensi yang rendah tetap menjadi hambatan dalam pelayanan publik meskipun pejabat memiliki posisi tinggi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bahwa penguatan kapasitas aparatur desa tidak dapat hanya mengandalkan pengalaman atau jabatan formal semata, tetapi harus didukung oleh pendidikan yang relevan, pelatihan berkala, dan pembinaan kompetensi berbasis kebutuhan lokal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Tingkat Kompetensi Aparatur, Aparatur desa memiliki kompetensi sedang hingga tinggi, terutama dalam aspek sikap pelayanan dan keterampilan teknis, namun masih terdapat kelemahan pada aspek pemanfaatan teknologi informasi.
2. Kualitas Pelayanan Publik, Masyarakat menilai kualitas pelayanan cukup baik, terutama pada aspek responsibilitas dan ketepatan waktu, namun masih perlu peningkatan transparansi dan efisiensi.
3. Pengaruh Kompetensi terhadap Pelayanan, Kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik baik secara parsial maupun simultan.

DOI:

4. Peran Moderator, Pendidikan dan pelatihan memperkuat hubungan antara kompetensi dan pelayanan publik. Sedangkan usia dan jabatan tidak signifikan sebagai moderator.

### Saran

1. Pemerintah Daerah dan DPMG, Agar merancang pelatihan berkelanjutan yang berbasis kompetensi praktis, seperti administrasi digital, pengelolaan keuangan, dan pelayanan berbasis teknologi.
2. Kepala Desa dan Sekretariat, Melakukan pemetaan kompetensi secara periodik, memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, dan memberikan insentif berbasis kinerja.
3. Aparatur Desa, Aparatur perlu secara aktif mengikuti pelatihan dan mengembangkan kapasitas diri, terutama dalam penggunaan teknologi informasi.
4. Peneliti Selanjutnya, Disarankan melakukan pendekatan mix-method (kuantitatif-kualitatif) serta memperluas wilayah penelitian untuk mendapatkan generalisasi lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A., & Pratama, A. (2021). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 12(2), 88–102.
- Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *West European Politics*, 33(5), 946–967.
- COSO. (2013). *Internal Control – Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2013). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (3rd ed.). Routledge.
- Havesi, A. G. (2005). *Standards for Internal Control in the Government Sector: Common Body of Knowledge (CBOK)*. New York State Office of the Comptroller.
- Hayati, N. (2023). *Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Terutung Pedi Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara* [Skripsi, UIN Ar-Raniry].
- Heldawati, H. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan TI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 45–60.
- Horton, S., Hondeghem, A., & Farnham, D. (2011). *Competency Management in the Public Sector: European Variations on a Theme*. IOS Press.
- Indrawati, L. (2020). *Pengembangan Kompetensi Aparatur Dalam Pelayanan Publik di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 1-10.
- Karpa, M., & Akimov, O. (2021). Competence-Based Public Administration: Current Trends and Challenges. *Public Administration Aspects*, 9(2), 23–30.
- Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. (2023). *Indeks Desa Membangun dan Pelaksanaan SDGs Desa*. <https://kemendesa.go.id>
- Profit, N. (2020). Kompetensi Aparatur, TI dan Kontrol Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(1), 34–45.

- Purwana, D., & Sinurat, L. A. (2024). *Peran Kompetensi Aparatur Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik*. Prosiding KNIA, 6(1), 122–130.
- Rahman, F. (2023). Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi & Audit*, 18(2), 55–69.
- Rinaldi, A. (2019). Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 16(2), 145–158.
- Riyanto, B. (2023). Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan (Edisi Revisi). Yogyakarta: BPFE.
- Rizal, M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Melalui Peningkatan Kompetensi. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–58.
- Rudianto. (2013). Pengantar akuntansi. Jakarta: Erlangga.
- Setiawati, R. (2018). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 56–65.
- Sintyana, P. (2019). Capital structure analysis and its effect on firm value. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 21(2), 112–120.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wulandari, A., Sari, M., & Pratiwi, D. (2025). Capital structure and financial performance: A study of food and beverage companies in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(1), 88–102.